

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGENDALIAN MANAJEMEN KREDIT (Studi pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk Cabang Nganjuk)

Desi Sistianti Permatasari
Moch. Dzulkirom
Dwiatmanto
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
Email: Ad_Dhesy.bee29@gmail.com

ABSTRACT

This research has several purpose, and it is ; to know how to implementation the system of credit distribution accounting for entrepreneur financial for developing the controlling of credit management at Bank Jatim in Nganjuk. From result of research, the researcher found some weakness in credit management controlling and the procedure for shaping the system credit distribution accounting for entrepreneur financial like the step of credit supplies which is not appropriate yet in managing of bundles of credit. And the other is in controlling of credit management still seem some weakness which is must be repaired, such kind of duty separating which is double , and documents that use isn't appropriate then it can't achieve credit controlling. Bank Jatim Cabang Nganjuk has to give the explanation for employees of their own duty clearly and be careful in credit analyzing in order to minimalist pile up credit that happens in every year continually, because it very effective for bank condition in order to get back the credit and it not to be suffer.

Keywords: *Accounting System, The accounting system credit distribution working capital, Credit management, Credit control*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi pemberian kredit modal kerja sebagai upaya meningkatkan pengendalian manajemen kredit pada Bank Jatim Cabang Nganjuk. Dari hasil penelitian, peneliti mengetahui beberapa kelemahan pada pengendalian manajemen kredit serta prosedur yang dimiliki yang membentuk sistem akuntansi pemberian kredit modal kerja seperti proses tahapan penyaluran kredit yang masih kurang tepat pengelolaan berkas-berkas kredit. selain itu, dalam pengendalian manajemen kredit masih juga terlihat beberapa kelemahan yang mungkin harus diperbaiki, seperti pemisahan tugas yang terdapat perangkapan, dan dokumen yang digunakan kurang memadai sehingga kurang mencapai pengendalian kredit. Bank Jatim Cabang Nganjuk harus memiliki uraian tugas masing-masing bagian yang jelas dan lebih teliti dalam melakukan analisis kredit sehingga dapat meminimalisasi kredit macet yang terjadi dari tahun ke tahun yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank, agar nantinya kredit yang diberikan benar-benar akan kembali sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Kata kunci: *Sistem Akuntansi, Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja, Manajemen kredit, Pengendalian Kredit*

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit akan memerlukan sistem akuntansi dalam pemberian kredit sebagaimana untuk mendukung kegiatan bank dalam membantu kebutuhan masyarakat mengenai dana. Menurut Kasmir (2007:72) bahwa “kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian”

Pemberian kredit sebagai fungsi modal kerja terdiri dari beberapa prosedur, yaitu diantaranya (1) pengajuan permohonan kredit, (2) wawancara calon debitur, (3) analisa kredit, (4) pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan kredit dan yang terakhir adalah (5) pencairan dana atas permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur. Sistem akuntansi pemberian kredit ini dijalankan oleh beberapa fungsi diantaranya adalah pimpinan bank, administrasi kredit, analis kredit, penyalur kredit, dan *teller*. Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:149) “Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah”.

Penggunaan sistem akuntansi pemberian kredit sebagai modal kerja dapat berjalan dgn baik dan efektif, apabila hal tersebut didukung dengan sistem pengendalian kredit terhadap manajemen yang baik serta benar sebagai upaya meningkatkan pengendalian manajemen kredit. pengendalian kredit menurut Hasibuan (2008:105) bahwa “pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Keberhasilan atas sistem pengendalian manajemen kredit akan dipengaruhi oleh beberapa Aspek yang dikemukakan oleh Tawaf dalam Dyastuti (2015). Aspek-Aspek yang terkait dalam pengendalian manajemen kredit diantaranya (1) Personel yang kompeten serta dapat dipercaya, (2) Adanya pemisahan tugas yang baik, (3) Prosedur otorisasi yg tepat (4) Dokumen dan catatan yg memadai, (5) Kontrol fisik aktiva serta catatan, dan (6) Pemeriksaan pekerjaan secara *independen*.

Bank Jatim Cabang Nganjuk merupakan lembaga keuangan (Bank) berstatuskan sbg bank konvensional y menyediakan pinjaman kredit bagi nasabah dengan memiliki kriteria dan prosedur pemberian kredit tertentu yang harus dipenuhi oleh para calon debitur pada saat melakukan mengajukan kredit. Bank Jatim Cabang Nganjuk memiliki proses pengajuan dan pencairan kredit yg diproses secara cepat, hal tersebutlah yg akan menimbulkan kegiatan analisis kredit berlangsung kurang optimal. Terjadi kesalahan atau kekeliruan dlm melakukan prosedur pemberian dan pengawasan kredit modal kerja yang disalurkan kepada calon debitur, dapat mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah atau bahkan menyebabkan kredit macet. Perkembangan jumlah kredit modal kerja yang telah disalurkan atau dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Nganjuk guna menunjang kebutuhan usaha calon debitur dapat dilihat dari sebuah data empiris yang dituangkan dalam tabel mengenai perkembangan kredit modal kerja selama 3 tahun terakhir per 31 Desember, sebagai berikut :

Tabel 1
Data Jumlah Kredit Bermasalah Bank Jatim
Cabang Nganjuk Per 31 Desember

Thn	Kredit Bermasalah			Jumlah Kredit Bermasalah	NPL
	Kurang Lancar (kolek.3)	Diragukan (kolek.4)	Macet (kolek.5)		
2013	66.577.558	108.302.411	1.519.896.615	1.694.776.584	0,30 %
2014	33.787.107	252.155.506	2.881.709.146	3.167.651.179	0,44 %
2015	940.080.198	523.549.825	9.060.544.440	10.524.174.463	1,32 %

Sumber: PT. BPD Jawa Timur Tbk. Cabang Nganjuk

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk memiliki ketentuan dalam target jumlah *Non Performing Loan* (NPL) untuk masing-masing cabang yang didirikannya. Ketentuan yang telah dibuat oleh kantor pusat, dalam hal ini Bank Jatim Cabang Nganjuk telah ditetapkan target *Non Performing Loan* (NPL) sebesar **0,22%**.

Berdasarkan permasalahan mengenai hasil perkembangan kredit per 31 Desember selama 3 tahun terakhir, disimpulkan bahwa Bank Jatim Cabang Nganjuk masih melebihi target yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Peneliti bertujuan menelusuri lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap pengendalian manajemen kredit dalam melakukan pemberian kredit modal kerja yang diperuntukkan bagi calon debitur dengan mengangkat judul "**Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Modal Kerja dalam Upaya**

Meningkatkan Pengendalian Manajemen Kredit (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Nganjuk)".

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi pemberian kredit modal kerja, serta menganalisis sistem akuntansi pemberian kredit modal kerja untuk meningkatkan pengendalian manajemen kredit Bank Jatim.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Sistem Akuntansi

Menurut Baridwan (2012:4) "Sistem Akuntansi adalah Formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi".

2.2. Perbankan

Kasmir (2012:24) menyatakan bahwa "Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan".

2.3. Pengertian Manajemen Kredit

Manajemen kredit merupakan pengelolaan kredit yang dijalankan oleh perusahaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sedemikian rupa sehingga kredit tersebut berjalan dengan baik sesuai kesepakatan antara bank dengan debitur. (Firdaus & Ariyanti, 2011:4).

2.4. Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2007:72) bahwa "kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian".

2.5. Kredit Modal Kerja

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:149) "Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah".

2.6. Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2010:117) Prinsip pemberian kredit menggunakan analisis 5C, yaitu :

- Character* (Watak/Kepribadian/Karakter)
- Capacity* (Kemampuan/Kapasitas)
- Capital* (Modal)
- Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)
- Collateral* (Jaminan atau Agunan)

2.7. Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Modal Kerja

Dikemukakan oleh Kasmir (2012:100) mengenai prosedur pemberian kredit secara umum sebagai berikut:

- Pengajuan berkas-berkas berupa Pengajuan proposal, dan pelampiran dokumen-dokumen seperti : Akte notaris, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
- Penyelidikan berkas pinjaman
- Wawancara awal
- On the Spot*
- Wawancara II
- Keputusan kredit
- Penandatanganan akad kredit/perjanjian
- Realisasi kredit
- Penyaluran/penarikan dana

2.8. Pengertian Pengendalian Kredit

Dikemukakan oleh Hasibuan (2008:105) bahwa definisi "pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet".

2.9. Aspek-Aspek Pengendalian Manajemen Kredit

1. Personel yang kompeten dan dapat dipercaya

- Pada saat permohonan personel harus tahu syarat dan data yang harus dipenuhi oleh nasabah, jenis fasilitas yang diperlukan nasabah, dll.
- Saat analisis punya pengetahuan dan kemampuan menganalisis kredit, Jujur, Objektif.
- Saat Penarikan Punya pengetahuan yuridis, mengenai pengikatan dan penguasaan jaminan kredit, serta pengetahuan mengenai asal dana sehingga terjamin penyediaan dana dan realisasi penarikannya.

- d. Saat Monitoring Mampu dan mengerti untuk memahami laporan-laporan usaha.

2. Adanya pemisahan tugas

- a. Saat permohonan, Petugas penilaijaminan berbeda dengan petugas analisis kredit.
- b. Saat analisis, Hasil analisis kredit dinilai kembali oleh pejabat bank yang lebih tinggi.
- c. Saat penarikan, Pejabat bank yang melakukan persetujuan/ approval atas penarikan kredit berbeda dengan petugas bank yang melakukannya.
- d. Saat monitoring, Petugas bank yang mengelola rekening kredit nasabah menginformasikan keadaan rekening kredit nasabah kepada pejabat bagian kredit.

3. Prosedur otorisasi yang tepat

- a. Saat permohonan, Prosedur permohonan kredit dipenuhi melalui proses dalam organisasi bank tersebut.
- b. Saat analisis, memperlihatkan adanya wewenang keputusan kredit dan syarat-syarat yang ditetapkan bank.
- c. Saat penarikan, hanya pejabat bank yang berwenang yang dapat memberi otorisasi dalam penarikan atas kredit nasabah
- d. Saat monitoring, petugas bagian kredit memperlihatkan catatan dari pejabat bank pada laporan nasabah.

4. Dokumen dan catatan yang memadai

- a. Kelengkapan data permohonan kredit nasabah.
- b. Analisis berdasarkan data / informasi selengkap mungkin.
- c. Kelengkapan dan standarisasi atas dokumen-dokumen, warkat bank serta perangkat kerja administrasi bank
- d. File perkreditan terpelihara, yang meliputi kredit file serta data mengenai nasabah

5. Kontrol fisik aktif dan catatan

- a. Pemeriksaan ditempat (On The Spot) atas usaha/proyek nasabah maupun jaminan kredit.
- b. Analisis berdasar pada hasil pemeriksaan ditempat (On The Spot).
- c. Penerikan kredit memperlihatkan stok dan piutang nasabah atau memperhatikan kebutuhan keuangan nasabah.
- d. Diadakan pemeriksaan on the spot secara teratur atas usaha/pabrik/proyek maupun stok nasabah.

- 6. Pemeriksaan pekerjaan secara independen,** Untuk memastikan berfungsinya sistem pengendalian dalam kegiatan perkreditan, seperti yang dikemukakan pada butir 1 sampai dengan 5 diatas, maka perlu ada pemeriksaan yang bersifat independen yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berisi dorongan untuk lebih mendinamisasi sistem pengendalian.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul yang bersangkutan ini termasuk kedalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian telah ditentukan sebagai dasar atas pembuatan skripsi ini, antara lain :

- 1. Sistem akuntansi pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk.
- 2. Bagaimana pengendalian manajemen kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk dalam menjalankan sistem pemberian kredit modal kerja yang efektif.

3.3. Analisis Data

- 1. Terkait sistem akuntansi pemberian kredit modal kerja yang menjelaskan mengenai bagaimana prosedur pemberian kredit modal kerja oleh Bank Jatim yg akan melibatkan :
 - a. Fungsi yang terkait proses kredit.
 - b. Dokumen yg dipergunakan.
- 2. Menganalisis pengendalian manajemen kredit bank mengenai sistem pemberian kredit modal kerja dengan berdasarkan :
 - a. Aspek pengendalian manajemen kredit terkait personel yang kompeten dan dapat dipercaya.
 - b. Aspek pengendalian manajemen kredit terkait adanya pemisahan tugas pada saat pemberian kredit modal kerja.
 - c. Aspek pengendalian manajemen kredit terkait prosedur otorisasi yg tepat saat pemberian kredit modal kerja.
 - d. Aspek pengendalian manajemen kredit terkait dokumen dan catatan yg memadai saat pemberian kredit modal kerja.
 - e. Aspek pengendalian manajemen kredit terkait kontrol fisik aktif dan catatan saat pemberian kredit modal kerja.

Kelima aspek diatas, kemudian dilakukan analisis mengenai pemeriksaan pekerjaan

secara independen guna memastikan bekerjanya sistem pengendalian dalam kegiatan perkreditan Bank Jatim Cabang Nganjuk.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Modal Kerja

Bank Jatim Cabang Nganjuk telah mampu menerapkan prosedur otorisasi secara baik, meskipun dalam pelaksanaannya terkadang masih terdapat prosedur pemberian kredit yang harus diperbaiki untuk menghindari permasalahan NPL yang kurang memenuhi target. Penentuan analisis terhadap sistem akuntansi pemberian kredit modal kerja dapat ditinjau perbandingannya dengan teori yang digunakan yaitu teori menurut kasmir (2012:100) tentang prosedur umum pemberian kredit. Analisis antara praktek dengan teori mengenai prosedur pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Nganjuk sebagai berikut :

a. Pada Saat Permohonan Kredit, Pada tahap awal pengajuan permohonan kredit calon debitur menyerahkan formulir berupa Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) beserta persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Jatim. Bank Jatim Cabang Nganjuk dalam hal ini hanya menentukan pembuatan SKPP sedangkan dalam teori pengajuan kredit perusahaan harus membuat proposal yang berisikan mengenai latar belakang perusahaan. Proses awal tersebut ini dimulai dari Bagian Admin & Pelaporan Kredit menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Berkas kredit yang lengkap akan didisposisikan kebagian umum untuk diserahkan ke penyelia operasional kredit. Prosedur pada saat permohonan kredit sudah berjalan cukup baik, namun alangkah baiknya sebelum berkas didisposisikan kebagian umum dan diturunkan ke penyelia kredit ada kalanya seluruh dokumen persyaratan kredit diserahkan kebagian analisis kredit dahulu untuk dilakukan pemeriksaan kembali terkait kelengkapan berkas dan melakukan *BI Checking*.

b. Pada Saat Analisis Kredit, Analisis kredit menerima dan melakukan pemeriksaan kembali kelengkapan persyaratan kredit serta melakukan *BI checking*, kemudian melakukan wawancara dan *On the spot* serta menilai agunan nasabah. Setelah melakukan *On the spot* membuat laporan kunjungan nasabah pada lembar *Call Report Survey* sesuai dengan keadaan nasabah

yang sebenarnya. Perbedaan pelaksanaan yang dilakukan oleh analisis kredit Bank Jatim Cabang Nganjuk dengan teori yang ada yaitu pada saat melakukan wawancara. Bank Jatim Cabang Nganjuk hanya melakukan 1 (satu) kali wawancara terkait informasi usaha calon debitur, namun didalam teori pelaksanaan wawancara dilakukan sebanyak 2 (dua). Pelaksanaan wawancara sebanyak 2 (dua) kali tersebut sebaiknya diterapkan oleh Bank Jatim Cabang Nganjuk, agar dalam hasil memperoleh informasi dapat lebih akurat untuk menghindari resiko penyaluran kredit dimasa mendatang. Penerapan sistem yang dilakukan oleh bagian analisis kredit sudah berjalan dengan baik, namun akan lebih baiknya apabila pada penilaian agunan dilakukan oleh seorang *supervisor* yang berkaitan dengan masalah kredit apakah kredit tersebut kedepannya dapat menguntungkan pihak bank ataukah tidak.

c. Putusan Kredit, Pelaksanaan pemberian kredit pada saat putusan kredit telah sesuai dengan teori yang dipergunakan. Dalam tahapan putusan kredit pada saat pimpinan cabang setuju dengan hasil rekomendasi, dan pimpinan cabang akan membuat catatan kepada bagian administrasi kredit atas pembuatan formulir yang berupa putusan kredit (PTK) untuk putusan kredit yang diterima, sedangkan apabila kredit ditolak maka seluruh berkas akan dikembalikan bagian administrasi kredit untuk membuat surat penolakan dengan disertai alasan penolakan. Hal tersebut telah dilaksanakan dengan prosedur yang sesuai dengan penanggung jawab yang baik.

d. Penarikan Kredit, Pelaksanaan pemberian kredit pada saat penarikan kredit yang pada awalnya melakukan akad perjanjian kredit antara bank dengan nasabah telah sesuai dengan teori yang dipergunakan, sebagai penjelasan yaitu bagian analisis kredit Bank Jatim Cabang Nganjuk melakukan menginput data nasabah yang disetujui pinjaman kreditnya oleh pihak bank, kemudian menerbitkan surat persetujuan pemberian kredit (SPPK), surat advis atau surat pengakuan hutang (SPH), surat perjanjian kredit, kwitansi pencairan dan tanda terima bukti agunan. Bagian analisis kredit menghubungi nasabah untuk melakukan realisasi kredit dengan memberitahukan bahwa debitur diharuskan untuk membawa buku tabungan bank jatim. Realisasi selesai dilakukan antara debitur, nasabah dan notaris, maka nasabah akan diarahkan ke *teller* untuk

pencairan dana. Sistem otorisasi yang dilakukan pada saat proses penarikan kredit telah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan prosedur yang tepat.

4.2. Analisis Pengendalian Manajemen Kredit pada Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja

Pengendalian manajemen kredit terkait dengan sistem akuntansi pemberian kredit modal kerja yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk akan dilakukan analisis dengan didasarkan pada teori yang telah dikemukakan oleh Tawaf dalam Dyastuti (2015) tentang aspek-aspek pengendalian kredit dalam proses kredit. analisis pengendalian manajemen kredit dalam prosedur pemberian kredit modal kerja, sebagai berikut :

a. Pada Saat Permohonan Kredit

1) Personel yang kompeten dan dapat dipercaya

Personel yang bertanggung jawab atas proses permohonan kredit mengetahui syarat kredit yang harus dilengkapi oleh calon debitur, yaitu mengetahui berbagai jenis pembiayaan yang diperlukan calon debitur, mengetahui syarat apa saja dalam pengajuan kredit dan mampu memeriksa kelengkapan atas persyaratan kredit oleh bagian admin kredit dengan teliti untuk dapat terhindar dari adanya penyimpangan yang dilakukan oleh calon debitur terkait pemalsuan identitas saat melakukan pinjaman di bank. Pengendalian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk yang terlihat dari segi personelnnya telah mampu meningkatkan pengendalian manajemen kredit yang baik.

2) Adanya pemisahan tugas

Pada saat permohonan kredit dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk terlihat bahwa adanya pemisahan tugas yg cukup baik, dapat dilihat dari petugas yang menerima surat permohonan kredit dan yang menganalisis dilakukan oleh fungsi yang berbeda, yaitu dilakukan oleh bagian administrasi kredit dan analisis kredit tanpa adanya perangkapan tugas.

3) Prosedur otorisasi yang tepat

Prosedur otorisasi adalah salah satu aspek terpenting dalam prosedur permohonan kredit yang dilakukan oleh pihak bank guna melayani nasabah. Pelaksanaan dalam penyaluran kredit ini telah sesuai dengan

ketentuan, misalnya terlihat pada bagian admin kredit dan pelaporan kredit memiliki tanggung jawab menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, sedangkan bagian analisis kredit bertanggung jawab melakukan pemeriksaan data debitur *BI checking* serta melakukan *on the spot* mengenai kelayakan usaha calon debitur. Hal ini dilakukan agar dapat terhindar dari penyimpangan fungsi tugas yang awalnya telah berikan oleh pihak Bank Jatim Cabang Nganjuk. Prosedur otorisasi yang dilakukan Bank Jatim atas permohonan kredit ini telah memiliki pengendalian manajemen kredit yang baik.

4) Dokumen dan catatan yang memadai

Langkah awal proses pengajuan kredit sebagai pemula dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh bank jatim dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur haruslah berdasarkan dengan adanya permohonan kredit secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku dan bertandatangan dari pihak si pemohon serta keterangan nama usaha yang didirikannya. Kewenangan pada bagian kredit yang akan memproses seluruh langkah pemberian kredit, khususnya dalam hal ini sering dilakukan oleh bagian administrasi kredit dan analisis kredit Bank Jatim telah melakukan pengecekan serta meneliti kelengkapan dari persyaratan dan data yang dibutuhkan untuk dapat dianalisis sebagai proses pengelolaan awal permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Pengendalian kredit yang dimiliki oleh Bank Jatim terkait dokumen dan catatan atas proses pemberian kredit dilaksanakan cukup baik. Namun efektifnya dilengkapi dengan lembar *checklist* atas keterangan kelengkapan berkas pengajuan kredit modal kerja.

5) Kontrol fisik aktiva dan catatan

Pengendalian terhadap kontrol fisik aktiva dan catatan pada saat permohonan kredit berlangsung hanyalah sebatas pemeriksaan atas kelengkapan berbagai persyaratan permohonan kredit milik calon debitur. Pemeriksaan yang terlihat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk telah dilakukan dengan baik, yang ditunjukkan dengan dilakukannya kunjungan langsung untuk melihat keadaan usaha calon debitur (*on the spot*) apakah

keaslian data dan informasi yang disampaikan nasabah dalam tahapan permohonan kredit dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pengendalian manajemen kredit atas kontrol fisik aktiva dan catatan dapat berlangsung baik.

b. Pada Saat Analisis Kredit

1) Personel yang kompeten dan dapat dipercaya

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk yang melakukan analisis kredit adalah bagian analisis kredit yang dalam hal ini memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang menganalisis kredit yang nantinya kredit tersebut diperuntukkan bagi debitur. Analisis kredit ada kalanya memiliki sikap berupa jujur, cermat serta seksama agar proses analisis dapat berjalan dengan baik. Terlihat dari kemampuan bagian analisis kredit dalam melakukan analisis kelayakan kredit, menunjukkan bahwa pengendalian intern PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk yang ditinjau dari segi personelnnya telah mampu mendukung pengendalian kredit secara tepat dan baik.

2) Adanya pemisahan tugas

Sebuah rekomendasi kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk yang dibuat atas dasar analisis kredit dilakukan oleh bagian analisis kredit. Hasil rekomendasi kredit tersebut kemudian diserahkan ke pimpinan cabang dimana akan dilakukan pemeriksaan ulang kembali rekomendasi yang telah dibuat oleh bagian analisis kredit baik dari segi keakuratan, kebenaran dan kelengkapan atas berbagai berkas persyaratan permohonan kredit dan berbagai informasi mengenai kondisi usaha nasabah sebelum diberikannya keputusan atas kelayakan kredit calon debitur. Proses analisis kredit berjalan cukup baik, namun dalam kenyataannya prosedur analisis kredit tersebut masih belum adanya pemisahan tugas pada saat melakukan penilaian kondisi usaha dan agunan, dimana kedua hal tersebut masih dilakukan oleh petugas yang sama yaitu petugas bagian analisis kredit. Sebaiknya, penilaian kondisi usaha debitur dengan *on the spot* dilakukan oleh bagian analisis kredit, sedangkan untuk penilaian agunan dilakukan oleh seorang *supervisor* sehingga memungkinkan dalam pemeriksaan

agunan dapat terlaksana dengan baik tanpa terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan.

3) Prosedur otorisasi yang tepat

Prosedur otorisasi dalam proses analisis kelayakan kredit yg menyangkut penerapan prinsip kehati-hatian merupakan hal yang sangat penting, pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk proses otorisasi dilakukan oleh yang berwenang berdasarkan tingkatannya, seperti bagian analisis kredit yang telah melakukan analisis kredit yang diajukan calon debitur diperiksa kembali oleh pimpinan cabang, sehingga batasan untuk penentuan keputusan pemberian kredit dari wewenang terkait hal perkreditan telah jelas dan tegas. Hal ini, menunjukkan bahwa pengendalian manajemen kredit yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

4) Dokumen dan catatan yang memadai

Data ataupun catatan yang pada dasarnya akan dijadikan dasar informasi untuk melakukan analisis, evaluasi dan keputusan pemberian kredit kepada calon debitur harus berdasarkan keterjaminan atas ketepatan, kebenaran dan kelengkapannya oleh para fungsi penanggung jawab dalam proses pemberian kredit, sehingga dalam penentuan hasil dari penilaian data calon debitur tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan secara tepat dan efisien untuk dapat memutuskan layak tidaknya pemberian kredit diberikan kepada calon debitur. Dokumen terkait pada saat proses analisis data ini lah berupa informasi dari *BI Checking* terkait status pinjaman dan kemampuan calon debitur, selain itu catatan hasil laporan kunjungan nasabah yang diperoleh dari kegiatan terjun lapangan kedalam lingkungan bisnis calon debitur beserta wawancara yang dilakukan. Hal ini dapat menunjukkan dalam proses analisis data kredit atas pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur pada bank jatim telah berjalan dengan baik dengan dokumen serta catatan yang digunakan sesuai prosedur yang layak.

5) Kontrol fisik aktiva dan catatan

Fungsi yang berwenang pada saat proses analisis data PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk adalah

bagian analis kredit, dimana bagian inilah yang melakukan penilaian atas kelayakan kredit berdasarkan kegiatan *on the spot*, mencari data dan informasi dengan cara mewawancarai calon debitur beserta tujuan penggunaan kredit yang diajukannya. pengendalian manajemen kredit berjalan dengan baik.

c. Pada Saat Penarikan Kredit

1) Personel yang kompeten dan dapat dipercaya

Penarikan atau dengan kata lain disebut pencairan kredit yang terdapat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk dilakukan oleh seorang analis kredit yang telah dipilih berdasarkan kemampuan serta pengetahuan yang kompeten mengenai penguasaan tentang perjanjian dan jaminan. Hal ini menghasilkan pengendalian manajemen kredit yang diterapkan pada Bank Jatim Cabang Nganjuk berjalan dengan baik dan tepat.

2) Adanya pemisahan tugas

Adanya pemisahan tugas yang terdapat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk. Terlihat bahwa petugas Bank Jatim yang melaksanakan proses penarikan kredit adalah bagian administrasi & pelaporan kredit dengan cara menerbitkan dokumen perjanjian yang digunakan pada saat penarikan kredit berlangsung. Apabila kredit telah disetujui oleh pimpinan cabang dengan pernyataan layak, maka bagian administrasi & pelaporan kredit akan menyerahkan dokumen tersebut untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa pimpinan cabang telah setuju untuk melakukan pemberian dana kepada debitur. Persetujuan telah dilakukan, kemudian bagian administrasi kredit berkoordinasi dengan *teller* pada saat akan dilakukannya realisasi kredit oleh pihak debitur. Hasil keterangan tersebutlah yang menjadi bukti bahwa pejabat bank yang melakukan persetujuan atas penarikan kredit berbeda dengan petugas yang melaksanakan proses kredit, sehingga dapat disimpulkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk memiliki pengendalian kredit terkait proses penarikan kredit yang baik dan tepat.

3) Prosedur otorisasi yang tepat

Prosedur otorisasi dalam proses penarikan kredit yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk

Cabang Nganjuk pihak yang berwenang dalam keputusan proses penarikan kredit adalah pimpinan cabang dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh petugas bagian administrasi kredit dengan berkoordinasi oleh pihak *teller* dalam proses melakukan realisasi kredit melalui sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh pihak debitur dan kreditur. Disimpulkan bahwa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk mampu meningkatkan pengendalian kredit yang baik dan tepat.

4) Dokumen dan catatan yang memadai

Berjalannya tahapan terakhir merupakan tahapan penarikan kredit, dalam hal ini aspek yang bersangkutan dengan dokumen beserta catatan administrasi yang sesuai dengan keperluan. Sebelum pelaksanaan realisasi setelah putusan kredit dinyatakan telah diterima, bagian administrasi kredit telah mampu mempersiapkan berbagai kelengkapan dokumen sebagai dasar pelaksanaan perjanjian kredit dan kelengkapan atas agunan, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian dalam proses penarikan kredit terkait dokumen dan catatan telah memadai dan berjalan cukup baik

5) Kontrol fisik aktiva dan catatan

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk Cabang Nganjuk telah melakukan inspeksi *on the spot* oleh bagian analis kredit untuk dapat membuktikan bahwa kebenaran atas fasilitas kredit telah digunakan sesuai dengan yang sesungguhnya dan sesuai dengan yang dijelaskan pada saat pengajuan permohonan kredit tercantum dalam formulir pengajuan kredit. semua dokumen milik calon debitur sebagai syarat ketentuan pengajuan kredit tersimpan baik ditempat yang aman. Pengendalian manajemen kredit yang terlihat pada saat proses penarikan kredit mampu mendukung manajemen kredit yang baik dan tepat.

d. Pada Saat Monitoring

1) Personel yang kompeten dan dapat dipercaya

Kegiatan memonitoring perkembangan kredit yang telah diberikan kepada debitur, dilakukan oleh seorang analis kredit Bank Jatim Cabang Nganjuk dengan memiliki kemampuan untuk memahami kondisi usaha nasabah. Namun, lebih baiknya apabila pada

saat kegiatan monitoring perkembangan kredit dibantu oleh *supervisor* yang lebih memahami penyimpangan kredit. Sistem pengendalian inilah yang perlu diperbaiki oleh Bank Jatim Cabang Nganjuk.

2) Adanya pemisahan tugas

Kegiatan pada saat monitoring perkembangan kredit yang dilakukan oleh debitor kurang adanya fungsi yang menanganinya. Monitoring inilah hanya dilakukan oleh seorang analis kredit Bank Jatim Cabang Nganjuk dengan hanya melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha debitor, dan tidak adanya keterlibatan *supervisor* dalam pengawasan tersebut. Supervisor melakukan penanganan terhadap kredit yang bermasalah. Sistem pengendalian inilah yang perlu untuk diperbaiki demi perkembangan manajemen Bank Jatim tersebut.

3) Prosedur otorisasi yang tepat

Monitoring atau pengawasan terhadap perkembangan kredit dilakukan oleh analis kredit dengan mendiskusikannya kepada pimpinan cabang merupakan prosedur otorisasi yang tepat, akan tetapi lebih efektifnya mengikut sertakan *supervisor* agar apabila terlihat akan terjadinya penyimpangan kedepannya dapat segera untuk ditangani dan tidak akan menimbulkan munculnya kredit macet.

4) Dokumen dan catatan yang memadai

Petugas bagian kredit pada Bank Jatim Cabang Nganjuk bertanggung jawab dalam hal meneliti kelengkapan seluruh dokumen kredit telah lengkap dan masih berlaku dengan berkekuatan hukum. Seluruh dokumen kredit yang diterima oleh Bank Jatim Cabang Nganjuk disimpan dengan aman dan baik didalam sebuah tempat penyimpanan dokumen terkait kredit, kemudian petugas bagian kredit diwajibkan untuk selalu melakukan pengecekan berbagai dokumen kredit dan juga diharuskan untuk menuliskan tanggal permohonan maupun penerusan kredit dalam buku registrasi kredit. pengendalian dalam hal ini telah mampu mendukung pengendalian manajemen kredit dengan cukup baik.

5) Kontrol fisik aktiva dan catatan

Petugas yang berwenang dalam masalah kredit pada Bank Jatim Cabang Nganjuk kurang melakukan pemeriksaan *on the spot* secara rutin terhadap perkembangan usaha

debitor. Pemeriksaan *on the spot* yang dilakukan oleh petugas Bank Jatim Cabang Nganjuk hanya dengan waktu 1 tahun sekali, hal tersebutlah yang perlu untuk meningkatkan pengendalian manajemen kredit.

5. Pemeriksaan Pekerjaan secara *Independen*

Pemeriksaan pekerjaan secara independen dilakukan untuk memastikan sistem pengendalian manajemen kredit dalam Bank Jatim Cabang Nganjuk telah berfungsi cukup baik ataukah tidak. Sistem pengendalian manajemen kredit yang dimiliki Bank Jatim tersebut memerlukan beberapa perbaikan dalam hal fungsi petugas hingga beberapa prosedur pemantauan perkembangan kredit. Pemantauan perkembangan kredit yang diserahkan kepada debitor hanya dilakukan oleh fungsi analis yang kemudian hasil laporan pemantauan kredit dilaporkan kepada pimpinan cabang, kurangnya keikutsertaan *supervisor*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Bank Jatim Cabang Nganjuk didalam melakukan pemberian kredit modal kerja terhadap calon debitor masih terdapat perbedaan prosedur dengan teori yang ada, diantaranya yaitu :
 - a. Pada saat permohonan kredit, Bank Jatim Cabang Nganjuk hanya menentukan pembuatan SPPK sedangkan dalam teori pengajuan kredit, perusahaan harus membuat proposal pengajuan kredit.
 - b. Pada saat analisis kredit, perbedaan pelaksanaan yang dilakukan oleh analis kredit Bank Jatim Cabang Nganjuk dengan teori yang ada yaitu pada saat melakukan wawancara. Bank Jatim Cabang Nganjuk hanya melakukan 1 (satu) kali wawancara terkait informasi usaha calon debitor, namun didalam teori pelaksanaan wawancara dilakukan sebanyak 2 (dua).
2. Sistem pengendalian manajemen kredit pada sistem akuntansi pemberian kredit modal kerja masih terdapat perbedaan praktek dengan teori yang ada, diantaranya yaitu :
 - a. Pada saat proses permohonan kredit terkait dokumen yang dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit, Bank Jatim Cabang Nganjuk tidak menetapkan pembuatan proposal pengajuan. Selain itu, kurang adanya kelengkapan berupa lembar *checklist*.

- b. Adanya perangkatan tugas pada saat analisis data mengenai penilaian kondisi usaha dan agunan calon debitur Bank Jatim Cabang Nganjuk.

5.2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan dan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dijelaskan melalui uraian sebelumnya, maka hasil masing-masing kesimpulan tersebut dapat diberikan berupa saran kepada Bank Jatim Cabang Nganjuk yaitu sebagai berikut :

1. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja
 - a. Saat pengajuan permohonan kredit, prosedur otorisasi pemberian kredit modal kerja yang dimiliki bank jatim sudah berjalan cukup baik, akan tetapi Bank Jatim Cabang Nganjuk pada saat pengajuan permohonan kredit akan lebih baiknya tidak hanya membuat SPPK, namun menetapkan pembuatan proposal pengajuan yang berisikan mengenai latar belakang perusahaan hingga keterangan nominal pinjaman agar lebih bersifat detail.
 - b. Pada saat analisis kredit, sesuai dengan teori yang ada bahwa Bank Jatim Cabang Nganjuk alangkah baiknya pelaksanaan wawancara dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pengendalian kredit pada saat analisis kredit masih memiliki kekurangan seperti halnya, melakukan *On the spot* dan menilai agunan oleh seorang analis kredit. Sebaiknya dalam menilai agunan dilakukan oleh *supervisor*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Baridwan, Zaki. 2012. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode Edisi Kelima*. Yogyakarta:BPFE.
- Budisantoso, Totok dan Nuritoma. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*. Jakarta:Salemba Empat.
- Firdaus, Rachmat & Ariyanti, Maya. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya Cetakan Kelima*. Bandung:Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Kasmir. 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Skripsi :

Dyastuti, Dita Oktaviana. 2015. *Analisis Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja Sebagai Salah Satu Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Unit Pamekasan Kota)*. Malang: Universitas Brawijaya.